

EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi Kasus UPTD Liponsos Keputih di Kota Surabaya)

Octavia Fransiska, Bambang Kusbandrij, Supri Hartono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2024

Revised Mei 2024

Accepted Mei 2024

Available online Mei 2024

Oktaviafransiska5@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

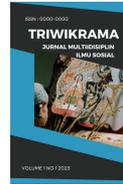
Masalah sosial merupakan tantangan kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun definisi yang diterima umum masih belum jelas. Salah satu contoh masalah sosial di Indonesia adalah masalah gelandangan dan pengemis. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah kemiskinan yang belum teratasi sampai tuntas, seperti ketimpangan pembangunan, kualitas layanan kesehatan, Sumber Daya Manusia yang rendah, keterampilan tenaga kerja yang rendah, angka putus sekolah tinggi dan rendahnya etos kerja. Penelitian ini fokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi bagian dari populasi gelandangan dan pengemis (gepeng) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Lingkungan (UPTD) Keputih. Fasilitas ini digunakan untuk menampung para PMKS, termasuk para gelandangan dan pengemis yang di razia oleh Satpol PP, Operasi Gabungan, maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pembinaan UPTD Liponsos Keputih untuk menilai keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas

organisasinya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuannya dalam penanganan PMKS gepeng. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di UPTD Liponsos Kota Surabaya adalah bahwa dampak dari program pembinaan gelandangan dan pengemis tersebut tidak memiliki dampak yang maksimal terhadap gelandangan dan pengemis ditandai dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalanan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di UPTD Liponsos Keputih adalah program pembinaan tersebut telah berjalan dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi dampak yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis belum dikatakan berhasil.

Kata Kunci : *Evaluasi Program, UPTD Liponsos, Pembinaan Gelandangan dan Pengemis*

A. PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan tantangan kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun definisi yang diterima umum masih belum jelas. Salah satu contoh masalah sosial di Indonesia adalah masalah gelandangan dan pengemis. Meskipun pemerintah dan lembaga swasta telah berupaya menanganinya, banyak masyarakat masih menghadapi kendala tersebut. Masalah gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang mendalam yang terjadi di berbagai kota besar maupun kecil. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah kemiskinan yang belum teratasi sampai tuntas, seperti ketimpangan pembangunan, kualitas layanan kesehatan, Sumber Daya Manusia yang rendah, keterampilan tenaga kerja yang rendah, angka putus sekolah tinggi dan rendahnya etos kerja.



Akibat dari hal tersebut adalah gelandangan dan pengemis semakin berkembang menjadi fenomena sosial kemiskinan yang serius di Indonesia.

Lingkup gelandangan meliputi individu dari anak hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berusia sekitar 18-59 tahun. Mereka hidup tanpa tempat tinggal tetap dan sering berpindah-pindah. Lingkup pengemis juga meliputi individu dari anak hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berusia 18-59 tahun. Mereka mengemis di berbagai tempat umum dengan menampilkan perilaku untuk mendapatkan belas kasihan. Peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia disebabkan oleh faktor kompleks, terutama masalah ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja di perkotaan. Terdapat dua faktor utama, yaitu faktor subyektif (internal) seperti rendahnya kesadaran sumber daya manusia, dan faktor objektif (eksternal) yang memaksa seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya pembangunan sosial.

Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis berdampak pada terganggunya ketertiban sosial dengan adanya masalah ketidaknyamanan dan kurangnya keteraturan yang juga mengganggu keindahan kota. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, pengemis dapat ditemukan di berbagai tempat seperti persimpangan lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan dan keramaian lainnya. Bahkan tempat-tempat wisata, termasuk Wisata Religi Sunan Ampel yang merupakan salah satu tujuan wisata Islami dan juga menjadi tempat sasaran para pengemis. Gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya tersebar secara luas dengan berbagai usia, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pertumbuhan jumlah pengemis ini menjadi kekhawatiran karena dapat berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penanggulangan terhadap masalah ini karena gelandangan dan pengemis memiliki dampak terhadap ketertiban dan keamanan di perkotaan.

Penelitian ini fokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi bagian dari populasi gelandangan dan pengemis (gepeng) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Lingkungan (UPTD) Keputih. Fasilitas ini digunakan untuk menampung para PMKS, termasuk para gelandangan dan pengemis yang di razia oleh Satpol PP, Operasi Gabungan, maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pembinaan UPTD Liponsos Keputih untuk menilai keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas organisasinya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuannya dalam penanganan PMKS gepeng.

Hasil dari pra-survey menunjukkan bahwa studi evaluasi terhadap pelaksanaan program kepada gelandangan dan pengemis di Pondok Sosial Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa tujuan dari proyek atau kegiatan rehabilitasi sosial cenderung tidak dapat diukur dengan jelas untuk kelompok sasaran mereka. Akibatnya, proyek-proyek tersebut mungkin hanya menjadi kegiatan rutin yang memberikan kesibukan kepada penghuni liponsos. Studi evaluasi ini juga menghadapi tantangan khusus, di mana peneliti perlu mendapatkan informasi dari gelandangan dan pengemis yang merupakan klien dari UPTD Liponsos. "Untuk alokasi waktu pembinaan bagi gelandangan dan pengemis adalah 3 hari. Setelah itu, mereka membuat surat pernyataan dari UPTD Liponsos bahwa tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika mereka terjaring kembali, maka masa pembinaannya akan dilipatgandakan." Namun ancaman tersebut belum memberikan efek jera pada gepeng tersebut, sehingga gepeng dengan mudah kembali untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan "Evaluasi Dampak Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis UPTD Liponsos Keputih di Kota Surabaya".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan

apa yang saat ini berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini berlokasi di UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya. Lokasi penelitian ini terletak di Jl. Keputih Tegal, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan nomor kode pos 60111. Hal ini karena program pembinaan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi dampak program gelandangan dan pengemis. Adapun fokus penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan yang dilaksanakan oleh UPTD Liponsos Keputih dalam upaya mengevaluasi dampak program pembinaan yang berjalan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Sumber data menurut Siyoto (2015:28) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau informan melalui kuesioner, observasi atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Data yang diperoleh dapat berasal dari dokumen yang ada di lokasi penelitian, jurnal, artikel ataupun dari sumber literatur lain.

Wiliam Wiersma (1986) dikutip dari (Sugiyono, 2017:273) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari beberapa waktu. Triangulasi Sumber adalah Mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan kebenarannya. Triangulasi Teknik artinya peneliti membandingkan data dari sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk menguji keandalan data. Triangulasi Waktu artinya melakukan pengujian validitas data dengan melakukan wawancara, observasi, atau prosedur lain pada waktu yang berbeda, untuk melihat konsistensi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang akan dipaparkan oleh peneliti merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. Peneliti telah mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai informan, termasuk Kepala Bidang UPTD Liponsos, Pegawai Barak, dan klien gelandangan dan pengemis di UPTD Liponsos Keputih. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan mendokumentasikan program pembinaan gelandangan dan pengemis. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003) sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah program tersebut sudah sesuai dengan kriteria dalam konsep tersebut. Indikator atau kriteria yang digunakan untuk mencapai evaluasi program tersebut adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat menganalisis dan mengevaluasi evaluasi dampak program pembinaan di UPTD Liponsos Keputih. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran sejauh mana program yang diberikan sesuai dengan konsep yang ideal, serta memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan program pembinaan di masa depan.

Efektivitas

Efektivitas program pembinaan gelandangan dan pengemis di UPTD Liponsos Keputih, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya, masih perlu di evaluasi. Program ini di desain untuk memberikan kegiatan rehabilitasi singkat kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan dan pengemis. kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi ngaji, sholat di musholah, dan kegiatan kerajinan. Namun, partisipasi dari gelandangan dan pengemis dalam program tersebut masih rendah. Mereka kurang antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut, terutama setelah mengetahui bahwa rehabilitasi di UPTD Liponsos hanya berlangsung selama dua atau tiga hari jika diambil oleh pihak keluarga. Dalam hal mengukur keberhasilan program pembinaan gelandangan dan pengemis, masih terdapat kekurangan karena jangka



waktu rehabilitasi yang singkat. Di UPTD Liponosos Keputih, hanya diberikan edukasi saja kepada gelandangan dan pengemis. dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap program pembinaan gelandangan dan pengemis di UPTD Liponosos Keputih. Pengukuran efektivitas program harus mencakup aspek-aspek seperti partisipasi, durasi rehabilitasi, dan keberhasilan dalam memberikan rehabilitasi dan dukungan yang memadai kepada gelandangan dan pengemis. evaluasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan efektivitas program dan memberikan perhatian yang lebih baik kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surabaya.

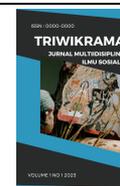
Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang optimal di UPTD Liponosos. Dalam wawancara dengan Kepala UPTD Liponosos, terungkap bahwa sumber daya yang digunakan berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh PMKS dan ODGJ, seperti cuci mobil atau motor dan kerajinan. Selain itu, dana dari Dinas Sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan PMKS dan ODGJ setiap harinya, serta peralatan mandi. Dalam mengevaluasi program pembinaan, penting untuk memastikan kelancaran program tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Liponosos dalam wawancara tersebut. Mekanisme evaluasi program pembinaan sebaiknya mencakup pengawasan dan pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya yang digunakan, seperti dana, peralatan. Dan kegiatan yang dilakukan oleh PMKS dan ODGJ. Evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan, serta memperbaiki proses pengelolaan jika ditemukan kekurangan atau ketidakefektifan.

Kecukupan

Efektivitas sebuah kebijakan program pembinaan dapat dipandang dari perspektif pemenuhan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang mungkin memunculkan masalah dalam program tersebut. Dalam konteks program pembinaan gelandangan dan pengemis di UPTD Liponosos Keputih, efektivitasnya terkait dengan berjalannya program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis. Dalam wawancara dengan Kepala UPTD Liponosos, terungkap bahwa terdapat kendala dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis tersebut, yaitu tidak bisa memaksa kehendak dari klien. Ini menunjukkan bahwa program ini harus disesuaikan dengan keinginan dan kemauan klien. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas program, karena partisipasi dan motivasi klien menjadi faktor penting. Selain itu, program pembinaan ini juga memiliki jam operasional yang ditentukan dan disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Kepala UPTD Liponosos menyatakan bahwa jam operasional untuk kegiatan tersebut adalah antara jam 10 pagi hingga 12 siang, serta kegiatan cuci motor dan cuci mobil dilakukan dari pagi hingga sore. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian waktu dan kegiatan sesuai minat dan kebutuhan klien. Meskipun program pembinaan ini memiliki beberapa kendala, hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan. Pegawai barak menyatakan bahwa program ini memiliki dampak positif, seperti meningkatkan keterlibatan klien dalam membantu pegawai dan membuat mereka merasa lebih nyaman dalam proses rehabilitasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembinaan ini, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi tersebut dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan dalam memaksa kehendak klien, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan klien dan memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang ada. Dengan melakukan evaluasi yang baik, program pembinaan ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Perataan



Dalam kebijakan publik, sasaran yang ditetapkan memiliki hubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial. Sasaran tersebut merujuk pada distribusi akibat dan upaya antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan efektif, efisien, dan mencukupi dengan memperhatikan prinsip persamaan atau kesetaraan. Dalam wawancara dengan Kepala UPTD Liponsos, terungkap bahwa mereka tidak membedakan siapa pun dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Namun, dalam pembinaan rohani, mereka memberikan kebebasan kepada klien sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek rohani, pihak UPTD Liponsos menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan individu tanpa membedakan siapa pun. Dalam menangani gelandangan dan pengemis, Kepala UPTD Liponsos mengungkapkan bahwa penanganannya dilakukan secara merata berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti membedakan berdasarkan usia. Gelandangan dan pengemis di bawah usia 60 tahun termasuk dalam kategori dewasa, sementara mereka yang berusia di atas 60 tahun termasuk dalam kategori lansia. Sedangkan anak jalanan di bawah usia 17 tahun termasuk dalam kategori anak-anak. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa perlakuan yang merata tanpa adanya diskriminasi menjadi faktor penting dalam menangani gelandangan dan pengemis. Ini berarti penting untuk menangani mereka tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, atau latar belakang hidup. Pendekatan yang merata dan tanpa diskriminasi akan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu yang terlibat dalam program pembinaan. Dengan demikian, dalam menangani gelandangan dan pengemis, penting untuk menjaga prinsip kesetaraan dan memastikan bahwa perlakuan yang diberikan merata dan tidak diskriminatif. Hal ini akan membantu menciptakan program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta memberikan perlindungan dan bantuan yang adil kepada seluruh kelompok masyarakat yang terlibat.

Responsivitas

Dalam tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembinaan, terdapat prediksi mengenai pengaruh yang mungkin terjadi sebelum program dilaksanakan. Setelah program pembinaan dilakukan dan dampaknya dapat dirasakan, masyarakat memberikan tanggapan positif berupa dukungan atau tanggapan negatif berupa penolakan. Dalam konteks program pembinaan gelandangan dan pengemis, Kepala UPTD Liponsos menjelaskan bahwa antara gelandangan dan pegawai memiliki preferensi masing-masing. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk memaksa mereka ikut program pembinaan. Jika mereka bersedia untuk mengikuti program, mereka dipersilakan, tetapi pegawai tidak dapat memaksa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme gelandangan dan pengemis terhadap program pembinaan masih kurang. Dalam wawancara dengan Ibu Kartini, seorang gelandangan yang telah direhabilitasi selama 5 tahun, ia menyatakan bahwa kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk aktif mengikuti kegiatan program. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor individu yang dapat memengaruhi partisipasi gelandangan dan pengemis dalam program pembinaan. Pegawai barak mengungkapkan bahwa kebanyakan klien tidak merasa nyaman dalam program pembinaan karena mereka lebih ingin berada di tempat tinggal mereka sendiri. Penting bagi pegawai untuk memberikan rasa nyaman kepada klien dan untuk memperhatikan identitas mereka agar dapat memulangkan mereka ke tempat tinggal mereka setelah rehabilitasi selesai. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa respon gelandangan dan pengemis terhadap program pembinaan masih kurang antusias. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan rasa nyaman klien dan berupaya meningkatkan partisipasi mereka dalam program pembinaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami kebutuhan dan preferensi individu, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan memberikan dukungan yang tepat untuk membantu mereka dalam proses rehabilitasi. Upaya untuk meningkatkan partisipasi gelandangan dan pengemis dalam program pembinaan haruslah dilakukan dengan penuh empati dan kepedulian terhadap situasi dan kondisi mereka. Memberikan dukungan yang tepat dan memastikan program pembinaan

memberikan manfaat yang nyata bagi mereka akan membantu menciptakan motivasi dan antusiasme yang lebih besar dalam mengikuti program tersebut.

Ketepatan

Dalam mengevaluasi keberhasilan program pembinaan gelandangan dan pengemis, penting untuk memiliki indikator yang dapat mengukur dampak program tersebut. Keberhasilan dapat diukur melalui dampak yang tidak terduga, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kemungkinan adanya alternatif lain yang dianggap lebih baik daripada program yang sedang dilaksanakan. Hal ini akan membuat program lebih dinamis dalam pergerakannya dan dapat mengadaptasi perubahan kebutuhan dan permasalahan yang muncul. Namun, dalam konteks program pembinaan gelandangan dan pengemis, disebutkan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan sangat jarang. Ini mengindikasikan bahwa mungkin tidak ada metrik yang jelas atau indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program rehabilitasi atau pengurangan jumlah gelandangan dan pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UPTD Liponsos, fokus mungkin lebih pada memberikan edukasi kepada gelandangan dan pengemis daripada melaksanakan program rehabilitasi secara lebih luas. Selain edukasi, beberapa program lain yang disebutkan termasuk pemeriksaan sidik jari, reunifikasi atau pemulangan ke keluarga, dan program penyaluran. Namun, tidak dijelaskan bagaimana program-program ini diukur keberhasilannya atau apakah terdapat indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari program-program tersebut. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembinaan gelandangan dan pengemis, penting untuk mengembangkan indikator yang relevan dan dapat diukur untuk mengevaluasi keberhasilan program. Indikator tersebut dapat mencakup penurunan jumlah gelandangan dan pengemis, peningkatan kesejahteraan sosial mereka, tingkat partisipasi dalam program, atau perubahan positif lainnya dalam kehidupan mereka. Dengan memiliki indikator yang jelas, program dapat dievaluasi secara sistematis dan diperbaiki sesuai kebutuhan, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Evaluasi Dampak Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di UPTD Liponsos Kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai Efektivitas, dalam kriteria ini pelaksanaan program pembinaan gelandangan dan pengemis di UPTD Liponsos Keputih, evaluasi mendalam perlu dilakukan. Evaluasi ini harus melibatkan pengukuran partisipasi, durasi rehabilitasi, dan keberhasilan program dalam memberikan rehabilitasi dan dukungan yang memadai. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program pembinaan agar lebih efektif dalam membantu gelandangan dan pengemis mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
2. Nilai Efisiensi, dalam hal ini UPTD Liponsos berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui pendekatan yang beragam dan mengikuti prosedur yang berlaku, diharapkan program pembinaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para klien. Pentingnya untuk terus meningkatkan partisipasi klien dan membangun hubungan yang positif antara pihak luar dan klien guna meningkatkan efektivitas program pembinaan secara keseluruhan.
3. Nilai Kecukupan, penerapan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 dan pendekatan yang tepat dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis di UPTD Liponsos Keputih memberikan pemulihan dan pemberdayaan kepada klien. Keterlibatan sukarela klien, pendekatan yang humanis, dan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan rehabilitasi yang efektif dan inklusif. Dalam upaya mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis, program pembinaan ini memperhatikan



kebutuhan individu klien dan memberikan dorongan yang tepat untuk aktif terlibat dalam proses pemulihan.

4. Nilai Perataan, dilihat dari penanganan pegawai kepada gelandangan dan pengemis di UPTD Liponsos didasarkan pada pendekatan yang merata, menghargai terhadap kebebasan beragama, perhatian pada kondisi kesehatan klien, dan bimbingan yang memadai juga disediakan untuk membantu klien mencapai pemulihan dan pemberdayaan yang optimal.
5. Nilai Responsivitas, dalam pelaksanaan dari program tersebut, gelandangan dan pengemis memiliki preferensi dan pilihan sendiri terkait partisipasi dalam program pembinaan. Dalam hal ini, pegawai tidak bisa memaksakan partisipasi mereka.
6. Nilai Ketepatan, berjalannya program pembinaan didasarkan oleh indikator yang dapat mengukur dampak program tersebut. Indikator program pembinaan mencakup penurunan jumlah gelandangan dan pengemis, peningkatan kesejahteraan sosial mereka, tingkat partisipasi dalam program atau perubahan positif lainnya dalam kehidupan gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anba, Efnuz, and Santoso R. Slamet. 2021. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, Dan Pengemis Di Kota Semarang)." *Journal of Public Policy and Management Review* 10(1).
- Cynthia, Vania, and Rahmadani Yusran. 2021. "EVALUASI PROGRAM DESAKU MENANTI DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PADANG." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 3(1). doi:10.24036/jmiap.v3i1.191.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI, 2006.
- Mulyadi, Deddy, Hendrikus T. Gedeona, and M. Nurafandi. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik* No Title. Cet.2, Ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Singadilaga. (2001). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.